TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 2331-2337
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Implementation of Village Funds and the Reproduction of Local Elite Power in Village Governance and Accountability in Indonesia

Siti Marwiyah[1], Gilang Firman Prasetyo[2], Yunita Apriliani[3], Diki Wahyudi [4]
* marwiyah@upm.ac.id
[1,2,3,4] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia

ABSTRACT
The Village Fund policy, which is based on Law Number 6 of 2014, represents a form of fiscal decentralization from the central government to villages aimed at promoting equitable development and improving community welfare. This study aims to examine the implementation of Village Funds, analyze the practices of local elite domination in their management, and evaluate the application of village governance and accountability principles. The study employed a descriptive qualitative method with a library research approach and was analyzed using the theories of elite capture and power reproduction proposed by Pierre Bourdieu. The findings indicate that the administrative implementation of Village Funds has generally followed existing procedures and contributed to infrastructure development and community empowerment in rural areas. However, in practice, the dominance of local elites is still evident through control of information, influence in village deliberations, and patronage relationships that strengthen certain power positions. On the other hand, the principles of transparency, participation, and accountability have been implemented normatively, yet their application remains suboptimal due to limited access to information, low levels of public understanding, and weak supervisory functions. Therefore, Village Funds function not only as instruments of rural development but also as spaces for the reproduction of local elite power. Consequently, strengthening community participation, improving transparency, and reforming village institutions are necessary to ensure that Village Fund management becomes more democratic and accountable.

Keywords: accountability; Village Funds; elite capture; local elite power; village governance

PENDAHULUAN
Pelaksanaan desentralisasi setelah era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah desa untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, serta pengelolaan keuangan secara mandiri. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (Rahmarisa et al., 2024).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Secara konseptual, Dana Desa diposisikan sebagai instrumen pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan desa. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antarwilayah. Akan tetapi, implementasi Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi persoalan dalam aspek tata kelola pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan transparansi, partisipasi masyarakat, dan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance*. Azwar (2025) menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat desa seringkali memunculkan dominasi kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, informasi, dan kekuasaan politik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan demokrasi lokal yang partisipatif, melainkan dapat membuka peluang bagi penguatan kekuasaan elit lokal dalam tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Soraida (2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Desa berpotensi melahirkan praktik *elite capture*, yaitu situasi ketika kelompok elit memanfaatkan kebijakan publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini muncul akibat adanya ketimpangan akses terhadap informasi, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Akibatnya, distribusi manfaat pembangunan menjadi kurang merata dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa.

Selain itu, Pandiangan et al. (2021) menjelaskan bahwa keberadaan Dana Desa memang memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pengurangan kesenjangan sosial di desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan masyarakat secara substantif. Dalam praktiknya, kepala desa dan perangkat desa seringkali menjadi aktor dominan yang menentukan arah pembangunan serta prioritas penggunaan Dana Desa.

Sementara itu, Ramdani et al. (2024) menyoroti bahwa pengelolaan Dana Desa juga berkaitan erat dengan reproduksi kekuasaan elit lokal. Dominasi tersebut tidak hanya dibangun melalui kewenangan administratif, tetapi juga melalui penguasaan modal ekonomi, sosial, dan simbolik yang dimiliki elit desa. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga dapat berubah menjadi arena politik yang memperkuat posisi kelompok elit tertentu di tingkat lokal.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa studi mengenai Dana Desa selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara implementasi Dana Desa, reproduksi kekuasaan elit lokal, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya cenderung melihat fenomena *elite capture* hanya dari perspektif administrasi pemerintahan, sehingga belum banyak mengaitkannya dengan teori reproduksi kekuasaan sosial-politik.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi Dana Desa melalui perspektif reproduksi kekuasaan elit lokal dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola implementasi Dana Desa, memahami mekanisme reproduksi kekuasaan elit lokal dalam pengelolaan Dana Desa, serta mengevaluasi tingkat akuntabilitas pemerintahan desa di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan teori reproduksi kekuasaan Pierre Bourdieu dalam menganalisis praktik pengelolaan Dana Desa, sehingga penelitian tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada dinamika sosial-

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

politik yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Dana Desa dalam hubungannya dengan reproduksi kekuasaan elit lokal serta akuntabilitas pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dan dinamika kekuasaan secara komprehensif melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data tertulis (Creswell, 2018). Penelitian ini menggunakan jenis studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai referensi ilmiah sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan data dan analisis (Sugiyono, 2022).

Objek penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan Dana Desa di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pola tata kelola pemerintahan desa, dominasi elit lokal, serta praktik akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, publikasi lembaga negara, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Moleong, 2021). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan referensi agar data yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan Dana Desa, tata kelola pemerintahan desa, *elite capture*, serta reproduksi kekuasaan elit lokal. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat informasi penting dari setiap sumber yang digunakan dalam penelitian (Zed, 2018). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, menyeleksi sumber data, melakukan interpretasi data, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh (Sugiyono, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, makna, serta hubungan antar konsep yang ditemukan dalam berbagai literatur terkait implementasi Dana Desa dan reproduksi kekuasaan elit lokal (Krippendorff, 2019). Tahapan analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Miles et al., 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis dari Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana modal ekonomi, sosial, dan simbolik berperan dalam mempertahankan dominasi elit lokal dalam tata kelola pemerintahan desa.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi sekaligus meningkatkan validitas hasil penelitian sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Dana Desa di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pola pembangunan di tingkat desa. Sejak mulai diterapkan pada tahun 2015, Dana Desa menjadi instrumen pemerintah dalam memperkuat kapasitas desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Kementerian Desa PDTT, 2023). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi Dana Desa secara administratif telah mengikuti tahapan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

yang ditetapkan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan anggaran desa. Tahapan perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa (*musdes*) yang secara formal bertujuan menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Selanjutnya, program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah tersebut dengan dukungan sistem administrasi keuangan desa seperti Siskeudes untuk mendukung ketertiban pengelolaan anggaran dan transparansi penggunaan dana (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Secara empiris, implementasi Dana Desa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, khususnya pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta program padat karya yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Pandiangan et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah desa. Akan tetapi, hasil penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih cenderung bersifat prosedural. Keterlibatan masyarakat sering kali hanya terbatas pada kehadiran dalam forum musyawarah tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir pembangunan desa (Azwar, 2025).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang berkembang di tingkat lokal. Dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa masih didominasi oleh elit desa, terutama kepala desa dan perangkat desa yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa. Mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi anggaran, kewenangan administratif, serta jaringan sosial yang memungkinkan mereka menentukan arah pembangunan desa (Pandiangan et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi elit lokal terlihat dari penguasaan informasi mengenai perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa yang tidak sepenuhnya dapat diakses masyarakat. Ketimpangan akses informasi tersebut menciptakan kondisi *asymmetry of information*, di mana elit desa memiliki posisi yang lebih kuat dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan sesuai kepentingan tertentu (Azwar, 2025).

Selain penguasaan informasi, dominasi elit lokal juga terlihat dalam pelaksanaan musyawarah desa. Secara normatif, musyawarah desa merupakan ruang deliberatif yang dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa forum tersebut dalam praktiknya masih dikendalikan oleh kepala desa dan perangkat desa, mulai dari penentuan agenda hingga pengambilan keputusan akhir. Akibatnya, masyarakat cenderung hanya berperan sebagai peserta formal tanpa memiliki ruang yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan desa secara substantif (Soraida, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa distribusi kekuasaan dalam tata kelola desa masih belum berjalan secara seimbang.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya praktik patronase dalam distribusi sumber daya desa. Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dalam beberapa kasus justru dimanfaatkan untuk memperkuat loyalitas politik dan sosial terhadap elit desa. Bentuk patronase tersebut terlihat melalui pembagian proyek pembangunan, bantuan sosial, maupun program pemberdayaan yang lebih banyak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa (Ramdani et al., 2024). Pola hubungan semacam ini memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap elit lokal sekaligus mempertahankan dominasi kekuasaan mereka dalam struktur sosial desa.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *elite capture*, yaitu kondisi ketika kebijakan publik yang seharusnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas justru dikuasai

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

oleh kelompok elit tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri (World Bank, 2020). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, praktik *elite capture* terjadi karena adanya ketimpangan akses terhadap informasi, kekuasaan, dan sumber daya yang dimiliki elit desa. Situasi tersebut memungkinkan elit lokal mengendalikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga distribusi manfaat pembangunan desa. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menjadi arena kontestasi kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam perspektif teori Pierre Bourdieu, dominasi elit lokal dalam pengelolaan Dana Desa dapat dipahami melalui konsep reproduksi kekuasaan yang dibangun melalui akumulasi modal ekonomi, sosial, dan simbolik. Modal ekonomi terlihat dari kemampuan elit desa mengendalikan distribusi anggaran Dana Desa untuk menentukan prioritas pembangunan. Modal sosial tercermin melalui jaringan relasi dengan tokoh masyarakat dan kelompok tertentu yang memperkuat dukungan sosial terhadap elit desa. Sementara itu, modal simbolik muncul dalam bentuk legitimasi sosial, status, dan kepercayaan masyarakat yang membuat dominasi elit dianggap wajar dan sulit dipertanyakan (Ramdani et al., 2024). Ketiga bentuk modal tersebut saling berkaitan dan terus direproduksi sehingga kekuasaan elit lokal tetap bertahan meskipun kebijakan pembangunan mengalami perubahan.

Dari aspek tata kelola pemerintahan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah desa telah menerapkan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Kementerian Desa PDTT, 2023). Struktur pemerintahan desa juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa (Pandiangan et al., 2021). Selain itu, berbagai mekanisme formal seperti musyawarah desa, RPJMDes, dan RKPDes telah disediakan sebagai instrumen untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan demokratis (Azwar, 2025). Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Transparansi informasi belum sepenuhnya berjalan optimal, partisipasi masyarakat masih terbatas, dan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan cenderung tidak merata (Soraida, 2024).

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan Dana Desa sebenarnya telah didukung oleh berbagai instrumen administratif seperti Siskeudes, APBDes, dan laporan realisasi anggaran yang bertujuan meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023). Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh BPD dan inspektorat daerah melalui mekanisme audit serta evaluasi pengelolaan Dana Desa (Pandiangan et al., 2021). Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas masih belum optimal akibat rendahnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran, terbatasnya literasi keuangan masyarakat desa, serta lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal (Azwar, 2025; Soraida, 2024). Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan dan memperkuat dominasi elit dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teoritis yang dilakukan, dapat dipahami bahwa implementasi Dana Desa di Indonesia memiliki dua karakteristik utama. Di satu sisi, Dana Desa berhasil mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi ruang reproduksi kekuasaan elit lokal melalui praktik *elite capture* dan dominasi sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi dan regulasi formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan sosial-politik yang berkembang di tingkat desa. Penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi informasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

KESIMPULAN

Implementasi Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi desa. Meskipun pengelolaannya secara administratif sudah mengikuti ketentuan pemerintah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi informasi, serta dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga menjadi ruang terjadinya praktik *elite capture* dan reproduksi kekuasaan elit lokal. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini terbatas pada studi literatur sehingga belum menggambarkan kondisi lapangan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan desa agar tata kelola Dana Desa menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan kontekstual.

Pernyataan Apresiasi (jika ada)

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel berjudul *"Implementasi Dana Desa dan Reproduksi Kekuasaan Elit Lokal: Studi Tata Kelola dan Akuntabilitas Desa di Indonesia."* Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai lembaga dan pihak yang telah menyediakan referensi, data, serta informasi yang mendukung proses penelitian, khususnya instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Penulis juga mengapresiasi para akademisi, dosen pembimbing, serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif sehingga artikel ini dapat disusun dengan lebih baik. Selain itu, penghargaan turut disampaikan kepada seluruh peneliti terdahulu yang hasil penelitiannya menjadi rujukan penting dalam memperkuat analisis penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, A. (2025). *Desentralisasi fiskal dan dominasi elit lokal dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–58.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Pedoman pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes*. BPKP Republik Indonesia.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Kementerian Desa PDTT. (2023). *Pedoman umum pengelolaan Dana Desa dan pembangunan desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan Dana Desa dan penguatan tata kelola pemerintahan desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Pandiangan, R., Sihombing, M., & Hutapea, D. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Governance*, 6(2), 101–115.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Rahmarisa, N., Putri, A., & Kurniawan, F. (2024). Implementasi kebijakan Dana Desa dalam

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 9(1), 33–47.

Ramdani, R., Yusuf, M., & Hidayat, T. (2024). Reproduksi kekuasaan elit lokal dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 15(3), 211–225.

Soraida, L. (2024). Elite capture dalam implementasi Dana Desa dan dampaknya terhadap distribusi pembangunan lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 88–102.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

World Bank. (2020). *Local governance and elite capture in decentralized development programs*. World Bank Publications.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135